

Penentuan Infrastruktur Prioritas Di Wilayah Pinggiran Kota Yogyakarta

Wahyu Endy Pratista, Putu Gde Ariastita

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia

e-mail: ariastita@urplan.its.ac.id

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis infrastruktur yang menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah pinggiran di Kota Yogyakarta sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Adapun metode yang digunakan adalah teknik analisis delphi untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta serta untuk mengetahui jenis infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta tersebut berdasarkan penilaian para *stakeholder*. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa jenis infrastruktur yang menjadi prioritas pengembangan baik pada wilayah pinggiran yang memiliki kecenderungan infrastruktur desa (Kecamatan Mantrijeron, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Wirobrajan, Jetis, dan Tegalrejo) maupun pada wilayah pinggiran yang memiliki kecenderungan infrastruktur desa-kota (Kecamatan Mergangsan) adalah infrastruktur air bersih.

Kata Kunci—Infrastruktur, Sub urban, Urban Sprawl

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perkotaan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota yang semakin pesat menuntut pula kebutuhan lahan yang semakin besar sehingga perkembangan perkotaan yang semula memusat pada daerah tengah kota secara perlahan akan tertumpah pada daerah pinggiran kota akibat dari semakin terbatasnya ketersediaan lahan di pusat kota [1]. Namun, Intervensi penggunaan lahan pada wilayah pinggiran yang dilakukan tanpa pertimbangan atau perencanaan yang baik akan mengganggu atau mengurangi keseimbangan kegiatan sektor-sektor pembangunan secara keseluruhan [2].

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat kebudayaan, pusat pemerintahan, daerah pariwisata, dan kota pelajar senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan secara terus-menerus ini mengakibatkan daerah yang langsung berbatasan dengan Kota Yogyakarta, telah banyak mendapat pengaruh kota (*urban sprawl*). Perkembangan fungsi Kota Yogyakarta yang semakin tinggi intensitasnya dihadapkan pada keterbatasan lahan yang mengakibatkan sulitnya memperoleh lahan untuk mawadahi tuntutan kehidupan kota. Dengan demikian maka perkembangan Kota Yogyakarta akhirnya mengarah ke daerah pinggiran kota. Namun, perkembangan yang terjadi di pinggiran Kota Yogyakarta menunjukkan perbedaan dengan kawasan di Pusat Kota Yogyakarta.

Paparan data pertumbuhan lahan terbangun dan

perkembangan infrastruktur di kawasan pinggiran Kota Yogyakarta menurut [3] menunjukkan perbedaan perkembangan pada masing-masing fungsi lahan serta jenis infrastruktur. Pelayanan listrik di Kecamatan Mantrijeron misalnya, yang mana berdasarkan data pengguna listrik menunjukkan bahwa pelayanan listrik di kecamatan tersebut hanya mampu melayani 79% penduduk. Sedangkan di wilayah kecamatan lain di pusat kota, pelayanan listrik telah mampu melayani 100% penduduk. Padahal, pertumbuhan penggunaan lahan di Kecamatan Mantrijeron tersebut cenderung meningkat sebesar 0,42% untuk lahan permukiman dan 4,37% untuk lahan perdagangan dan jasa. Bahkan untuk infrastruktur drainase dan jalan di wilayah-wilayah pinggiran kota tersebut tidak mengalami peningkatan dibandingkan infrastruktur drainase dan jalan di wilayah pusat kota yang mana umumnya mengalami pengembangan [2].

Selain itu, pertumbuhan infrastruktur wilayah tersebut juga mengalami kesenjangan diantara wilayah pinggiran kota tersebut, seperti utilitas sanitasi di Kecamatan Kotagede meningkat sebesar 51%. Namun di lain pihak, utilitas sanitasi di Kecamatan Wirobrajan sama sekali tidak mengalami peningkatan. Begitu pula dengan infrastruktur air bersih di Kecamatan Mergangsan mengalami peningkatan sebesar 32%. Sedangkan infrastruktur air bersih di Kecamatan Jetis hanya mengalami peningkatan sebesar 1% [2].

Tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda dari tiap wilayah ini menimbulkan beberapa masalah infrastruktur yang berbeda pula dan juga menyebabkan perbedaan pelayanan yang ada pada tiap kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur prioritas untuk dikembangkan dan diharapkan dengan adanya penilaian terhadap infrastruktur prioritas ini mampu memberikan gambaran kebutuhan infrastruktur di kecamatan pinggiran Kota Yogyakarta yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

II. METODE PENELITIAN

A. Tipologi Wilayah Pinggiran Kota Yogyakarta

Metode yang digunakan untuk menentukan tipologi wilayah pinggiran Kota Yogyakarta sesuai dengan teori *land use triangle : continuum* dimana pembagian zona wilayah akan ditentukan berdasarkan proporsi penggunaan lahan antara fungsi kegiatan perkotaan maupun perdesaan [3].

Hasil dari analisis ini berupa zona-zona wilayah yang terdiri dari zona wilayah kota (zobikot), zona wilayah kota-

desa (zobikodes), zona bingkai desa-kota (zobidekot) dan zona bingkai desa (zobides). Batasan persentase proporsi penggunaan lahan yang digunakan sebagai dasar untuk membagi wilayah kedalam zona-zona peri urban tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.
Zonifikasi Wilayah Peri Urban

Kegiatan	Zona Ruang			
	Zona Bingkai i Kota	Zona Bingkai Kota-Desa	Zona Bingkai Desa-Kota	Zona Bingkai i Desa
Pertanian	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 75%	> 75%
Non Pertanian	> 75%	> 50% - < 75%	> 25% - < 50%	< 25%
Pertumbuhan Lahan Terbangun	> 75%	> 50% - < 75%	> 25% - < 50%	< 25%
Infrastruktur	> 75%	> 50% - < 75%	> 25% - < 50%	< 25%

Sumber: Yunus dan Hasil Analisa (2012)

B. Faktor Perkembangan Infrastruktur Wilayah Pinggiran di Kota Yogyakarta

Metode yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta adalah teknik analisis delphi yang mana melibatkan stakeholder yang memiliki keahlian, keilmuan, dan pemahaman yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas untuk mendapatkan faktor-faktor yang konsensus menurut pendapat para stakeholder tersebut. Adapun stakeholder yang menjadi responden delphi tersebut ditentukan secara purposif melalui stakeholder mapping, antara lain 4 stakeholder dari Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta (Bidang Drainase dan Pengairan, Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana, Bidang Bina Marga, dan Sie Tata Perkotaan), 2 stakeholder dari Bappeda Kota Yogyakarta (Bagian Tata Ruang Perkotaan dan Bagian Sarana Prasarana), 1 stakeholder dari PT. Titimatra Tujutama, serta 2 stakeholder yang merupakan tokoh masyarakat di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta.

C. Kebutuhan Infrastruktur Prioritas di Wilayah Pinggiran Kota Yogyakarta

Metode untuk mengetahui infrastruktur prioritas yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pinggiran di Kota Yogyakarta juga menggunakan teknik analisis delphi yang mana melibatkan stakeholder untuk memberikan pembobotan pada setiap jenis infrastruktur yang perlu dikembangkan di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta sesuai penilaian masing-masing stakeholder tersebut sehingga diketahui infrastruktur yang menjadi prioritas pengembangan. Adapun bobot yang diberikan untuk setiap jenis infrastruktur adalah 1 apabila infrastruktur tersebut cukup penting untuk dikembangkan di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta, 3 apabila infrastruktur tersebut penting untuk dikembangkan di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta, dan 5 apabila infrastruktur tersebut sangat penting untuk dikembangkan di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta.

III. HASIL PENELITIAN

A. Tipologi Wlayah Pinggiran Kota Yogyakarta

Tipologi wilayah pada penelitian ini dilihat dari pertumbuhan wilayah serta perkembangan infrastruktur pada pinggiran Kota Yogyakarta juga. Hal ini dikarenakan perkembangan perkotaan tidak hanya dilihat dari perkembangan kegiatan non pertanian saja tetapi juga diiringi dengan pertumbuhan lahan terbangun dan perkembangan infrastruktur yang memadai pada pinggiran Kota Yogyakarta.

Tabel 2.
Luas Penggunaan Lahan Wilayah Penelitian

Kecamatan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mantrijeron	201,7	9,6	13,5	0,5	2,5	0,1	33,2
Mergangsan	156,1	15,9	20,8	1,6	4,6	0,1	31,8
Umbulharjo	511,4	55,5	37,9	17,9	67,8	16,4	105,1
Kotagede	221,4	8,9	17,7	10,7	16,9	1,0	30,3
Gondokusuman	226,0	69,2	60,4	6,3	0,1	0,4	36,7
Wirobrajan	135,8	7,2	15,4	0,6	0,57	0,0	16,4
Jetis	105,7	18,2	23,1	2,9	0,0	0,6	19,6
Tegalrejo	185,7	18,9	9,1	9,6	26,1	0,7	40,9
Jumlah	1.743,7	203,5	197,9	50,1	118,6	19,3	313,9

Sumber: BPS Kota Yogyakarta (2011)

Keterangan:

- (1) Perumahan
- (2) Jasa
- (3) Perusahaan
- (4) Industri
- (5) Pertanian
- (6) Non Produktif
- (7) Lainnya

Adapun pertumbuhan lahan terbangun dari tahun 2006 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.
Pertumbuhan Pemanfaatan Lahan Terbangun 2006-2010 dilihat per Kecamatan

Kecamatan	Pertumbuhan Pemanfaatan Lahan Terbangun
Mantrijeron	0,81 %
Mergangsan	0,41 %
Umbulharjo	1,10 %
Kotagede	0,38 %
Gondokusuman	0,00 %
Wirobrajan	0,00 %
Jetis	0,00 %
Tegalrejo	1,30 %
Jumlah	0,62 %

Sumber: Hasil Analisa (2012)

Sedangkan pertumbuhan infrastruktur di pinggiran Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.
Pertumbuhan Infrastruktur Tahun 2006-2010 Dilihat per Kecamatan

Kecamatan	Pertumbuhan Pelanggan Listrik	Pertumbuhan Drainase	Pertumbuhan Sanitasi	Pertumbuhan Pengunaan Air Bersih	Pertumbuhan Jalan	Pertumbuhan Infrastruktur
Mantrijeron	41,24%	0%	44%	1%	0%	17%
Mergangsan	45,55%	0%	45%	32%	0%	25%

Kecamatan	Pertumbuhan Pelanggan Listrik	Pertumbuhan Drainase	Pertumbuhan Sanitasi	Pertumbuhan Pengguna Air Bersih	Pertumbuhan Jalan	Pertumbuhan Infrastruktur
Umbulharjo	31,74%	0%	23%	1%	0%	11%
Kotagede	9,73%	0%	51%	23%	0%	17%
Gondokusuman	7,95%	0%	11%	23%	0%	8%
Wirobrajan	7,04%	0%	0%	4%	0%	2%
Jetis	5,79%	0%	37%	14%	0%	11%
Tegalrejo	7,39%	0%	47%	9%	0%	13%
Jumlah	19,52%	0%	32%	12%	0%	13%

Sumber: Analisa (2012)

Data penggunaan lahan, pertumbuhan lahan terbangun, serta perkembangan infrastruktur diatas kemudian dihitung berdasarkan analisis zonifikasi wilayah peri urban. Penghitungan dilakukan dengan mengelompokkan jenis penggunaan lahan kedalam dua kegiatan yaitu pertanian dan non pertanian kemudian dicari persentasenya berdasarkan luas total wilayah. Hasil analisa struktur spasial dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.

Hasil Analisa Struktur Pinggiran Kota Yogyakarta Tahun 2010

Kecamatan	Lahan Non Pertanian	Pertanian	Struktur Wilayah Peri Urban
Mantrijeron	99,05%	0,95%	Zona Bingkai Kota
Mergangsan	98,00%	2,00%	Zona Bingkai Kota
Umbulharjo	91,65%	8,35%	Zona Bingkai Kota
Kotagede	94,46%	5,54%	Zona Bingkai Kota
Gondokusuman	99,99%	0,01%	Zona Bingkai Kota
Wirobrajan	99,68%	0,32%	Zona Bingkai Kota
Jetis	100,00%	0,00%	Zona Bingkai Kota
Tegalrejo	91,03%	8,97%	Zona Bingkai Kota

Sumber: Hasil analisa (2012)

Hasil tabel diatas menunjukkan masing-masing kecamatan pinggiran Kota Yogyakarta memiliki perkembangan fisik yang berbeda-beda. Tetapi pada wilayah penelitian memiliki karakteristik yang sama yaitu memiliki perkembangan yang termasuk dalam zona bingkai kota. Hal ini dikarenakan jumlah lahan non pertanian memang sangat mendominasi penggunaan lahan pada wilayah pinggiran Kota Yogyakarta. Hampir lebih dari 95% penggunaan lahan non pertanian dan hanya sekitar 5% saja lahan pertanian pada wilayah pinggiran Kota Yogyakarta.

Perkembangan pada masing-masing wilayah perkotaan ini tentunya juga dipengaruhi oleh kontribusi pertumbuhan infrastruktur dan perkembangan wilayah terbangun. Secara keseluruhan berdasarkan data pertumbuhan wilayah dan perkembangan infrastruktur di pinggiran Kota Yogyakarta. Secara menyeluruh berdasarkan data pertumbuhan

wilayah terbangun dan perkembangan infrastruktur hanya hanya mendapatkan 2 tipologi saja karena kecenderungan pertumbuhan lahan terbangun dan perkembangan infrastruktur cukup lambat dilihat dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Hasil analisa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.

Hasil Analisa Struktur Pinggiran Kota Yogyakarta dilihat dari pertumbuhan lahan terbangun dan perkembangan infrastruktur

Kecamatan	Pertumbuhan Pemanfaatan Lahan Terbangun	Pertumbuhan Infrastruktur	Struktur Wilayah Peri Urban Dilihat dari pertumbuhan Pemanfaatan Lahan Terbangun	Struktur Wilayah Peri Urban Dilihat Dari Perkembangan Infrastruktur
Mantrijeron	0,81%	17%	Zona Bingkai Desa	Zona Bingkai Desa
Mergangsan	0,41%	25%	Zona Bingkai Desa	Zona Bingkai Desa-Kota
Umbulharjo	1,10%	11%	Zona Bingkai Desa	Zona Bingkai Desa
Kotagede	0,38%	17%	Zona Bingkai Desa	Zona Bingkai Desa
Gondokusuman	0,00%	8%	Zona Bingkai Desa	Zona Bingkai Desa
Wirobrajan	0,00%	2%	Zona Bingkai Desa	Zona Bingkai Desa
Jetis	0,00%	11%	Zona Bingkai Desa	Zona Bingkai Desa
Tegalrejo	1,30%	13%	Zona Bingkai Desa	Zona Bingkai Desa

Sumber: Analisa (2012)

Dengan kedua hasil pada tabel diatas dapat menentukan tipologi wilayah pinggiran Kota Yogyakarta. Didapatkan 2 tipologi dengan tipe zona dengan kecenderungan infrastruktur desa dan zona dengan kecenderungan infrastruktur desa-kota. Hasil ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.

Tipologi Wilayah Pinggiran Kota Yogyakarta

Tipologi	Kecamatan
	Mantrijeron
	Umbulharjo
	Kotagede
Zona dengan kecenderungan infrastruktur desa	Gondokusuman
	Wirobrajan
	Jetis
	Tegalrejo
Zona dengan kecenderungan infrastruktur desa-kota	Mergangsan

Sumber: Hasil analisa (2012)

B. Faktor Penentu Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pinggiran di Kota Yogyakarta

Dari hasil kajian teori terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur di suatu wilayah didapatkan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur, antara lain kondisi finansial khususnya anggaran belanja pemerintah [4], perubahan penggunaan lahan [4] dan

[5], kondisi penduduk khususnya jumlah penduduk dan konflik penduduk [1] dan [4], pelayanan publik [4] dan [5], otonomi daerah khususnya berkaitan dengan kebijakan di bidang infrastruktur, serta kebencanaan. Adapun faktor-faktor yang ingin ditanyakan kepada stakeholder dalam kuesioner delphi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 8.
Faktor Penentu Perkembangan Infrastruktur Menurut Teori

Indikator	Variabel	Faktor
Kondisi Finansial	Anggaran belanja pemerintah	Alokasi anggaran belanja pemerintah untuk infrastruktur
Perubahan Lahan	Cepatnya perubahan penggunaan lahan	Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian
Kondisi Penduduk	Ada tidaknya konflik penduduk Peningkatan jumlah penduduk	Ada tidaknya konflik penduduk Peningkatan jumlah penduduk
Pelayanan Publik	Tingkat pelayanan	Tingkat pelayanan infrastruktur
Otonomi Daerah	Adanya kebijakan otonomi bidang infrastruktur	Adanya kebijakan otonomi bidang infrastruktur
Kebencanaan	Terjadinya bencana	Ada tidaknya dampak bencana

Sumber: Hasil Analisa (2012)

Dari hasil analisis delphi yang dilakukan dengan 2 tahap didapatkan faktor-faktor yang konsensus menurut pendapat para *stakeholder* sesuai karakteristik masing-masing wilayah:

a) Wilayah Pinggiran dengan Kecenderungan Infrastruktur Desa (Kecamatan Mantrijeron, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Wirobrajan, Jetis, dan Tegalrejo)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur di wilayah tersebut, antara lain:

1. Kondisi anggaran belanja pemerintah

Kondisi anggaran belanja pemerintah menurut para *stakeholders* merupakan faktor yang berpengaruh dalam hal penyediaan infrastruktur di wilayah penelitian. Masih adanya pengalokasian dana yang lebih prioritas sehingga menyebabkan semakin terbatasnya anggaran dana untuk penyediaan infrastruktur dan sebaliknya jika ada anggaran yang lebih dari cukup maka penyediaan infrastruktur jauh lebih banyak dan baik.

2. Tingkat pertumbuhan penduduk

Faktor peningkatan jumlah penduduk sangat mempengaruhi penyediaan infrastruktur karena semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur. Cepatnya peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak sebanding dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

3. Ada tidaknya dampak bencana

Bencana yang ada di setiap wilayah pasti memberikan dampak baik kecil maupun besar misalnya kerusakan fisik pada bangunan infrastruktur. Sehingga penyediaan infrastruktur sangat dibutuhkan pada pasca bencana guna teteap memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun di wilayah ini belum pernah terkena bencana besar.

4. Tingkat perubahan penggunaan lahan

Faktor perubahan lahan menurut para *stakeholders* merupakan faktor berpengaruh dalam penyediaan infrastruktur. Perubahan lahan yang terjadi di wilayah penelitian zona I lebih mengarah pada perubahan lahan menjadi kawasan jasa dan perusahaan, sebagian kecil wilayah berubah ke permukiman. Semakin cepatnya perubahan lahan tetapi masih tidak didukung dengan pelayanan infrastruktur yang baik.

5. Kondisi otonomi daerah

Kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan infrastruktur masih banyak yang belum diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang ada, walaupun kebijakan yang ada sudah memuat arahan pengembangan infrastruktur baik dalam hirarki yang paling tinggi (RTRW) maupun dalam Rencana Kerja.

b) Wilayah Pinggiran dengan Kecenderungan Infrastruktur Desa-Kota (Kecamatan Mergangsan)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur di wilayah tersebut, antara lain:

1. Kondisi anggaran belanja pemerintah

Kondisi anggaran belanja pemerintah menurut para *stakeholders* merupakan faktor yang berpengaruh dalam hal penyediaan infrastruktur di wilayah penelitian. Hal ini dikarenakan alokasi dari pemerintah kota untuk pengembangan infrastruktur di wilayah ini cukup banyak (terutama pasca gempa) sehingga sangat mempengaruhi perkembangan infrastruktur.

2. Tingkat pertumbuhan penduduk

Faktor peningkatan jumlah penduduk sangat mempengaruhi penyediaan infrastruktur karena semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur. Pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan pertumbuhan kebutuhan penduduk akan infrastruktur.

3. Ada tidaknya konflik penduduk

Berbeda dengan wilayah pinggiran dengan kecenderungan infrastruktur desa, di wilayah ini faktor ini masuk kedalam faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan infrastruktur. Hal ini dikarenakan masih sering terjadi konflik, misalnya di daerah bantaran Kali Code. Ataupun pada saat pemilihan umum terjadi, wilayah ini cukup sering terjadi bentrok karena letaknya yang cukup dekat dengan Kota Yogyakarta.

4. Tingkat perubahan penggunaan lahan

Faktor perubahan lahan menurut para *stakeholders* merupakan faktor berpengaruh dalam penyediaan infrastruktur. Sama halnya dengan pertumbuhan penduduk, faktor ini juga mengakibatkan tinggi dan cepatnya infrastruktur dibutuhkan.

5. Kondisi otonomi daerah

Hal ini dikarenakan *stakeholder* menganggap walaupun kecamatan masih belum dapat sepenuhnya mandiri, namun dengan adanya kebijakan ini paling tidak pemerintah Kota masih lebih memahami kebutuhan infrastruktur tiap kecamatan, daripada pemerintah pusat.

6. Tingkat pelayanan

Hal ini dikarenakan efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran yang tepat akan mempengaruhi pelayanan infrastruktur terutama di wilayah ini yang mana merupakan wilayah pinggiran di Kota Yogyakarta yang paling dekat dengan pusat kota.

7. Ada tidaknya dampak bencana

Hal ini dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah yang mendapat dampak yang cukup besar dari bencana gempa yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu, berbeda dengan wilayah pinggiran lain yang cenderung aman dari bencana.

C. Infrastruktur Prioritas di Wilayah Pinggiran Kota Yogyakarta

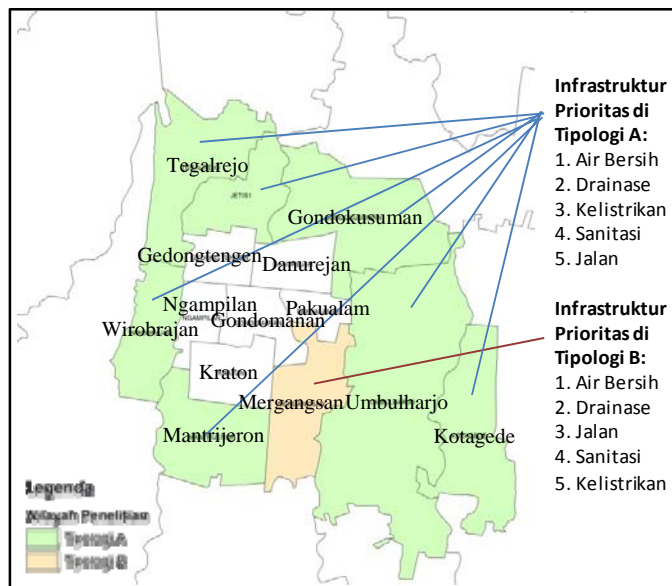
Berdasarkan hasil pembobotan terhadap setiap jenis infrastruktur menurut penilaian para stakeholder, dapat diketahui jenis-jenis infrastruktur yang menjadi prioritas pengembangan di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta:

a) Wilayah Pinggiran dengan Kecenderungan Infrastruktur Desa (Kecamatan Mantriheron, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Wirobrajan, Jetis, dan Tegalrejo)

Infrastruktur yang memiliki nilai bobot tertinggi di wilayah ini adalah air bersih (nilai bobot 38), drainase (nilai bobot 36), kelistrikan (nilai bobot 34), sanitasi (nilai bobot 32), dan jalan (nilai bobot 14) sehingga dapat dikatakan bahwa infrastruktur prioritas di wilayah ini adalah air bersih. Hal ini dikarenakan pelayanan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah ini masih sangat kurang dan hanya beberapa persen saja yang dapat terlayani oleh air bersih dari PDAM. Kecamatan Mantriheron adalah kecamatan yang paling rendah tingkat pelayanan air bersihnya, hanya mencakup 12% saja. Oleh karena itu, air bersih menjadi infrastruktur yang prioritas untuk dikembangkan.

b) Wilayah Pinggiran dengan Kecenderungan Infrastruktur Desa-Kota (Kecamatan Mergangsan)

Infrastruktur yang memiliki nilai bobot tertinggi di wilayah ini adalah air bersih (nilai bobot 36), drainase dan jalan (nilai bobot 34), sanitasi (nilai bobot 32), dan kelistrikan (nilai bobot 10) sehingga dapat dikatakan bahwa infrastruktur prioritas di wilayah ini juga air bersih. Hal ini dikarenakan pelayanan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah ini masih sangat kurang yakni hanya sebesar 26% saja, sama halnya dengan wilayah pinggiran lainnya di Kota Yogyakarta tersebut. Oleh karena itu, air bersih menjadi infrastruktur yang prioritas untuk dikembangkan.



Gambar. 1. Penentuan Infrastruktur Prioritas Pada Masing-Masing Tipologi Wilayah Pinggiran Kota Yogyakarta

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Faktor yang mempengaruhi pengembangan infrastruktur di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta dengan kecenderungan infrastruktur desa, yakni di Kecamatan Mantriheron, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Wirobrajan, Jetis, dan Tegalrejo adalah: (1) Kondisi anggaran belanja pemerintah, (2) Tingkat pertumbuhan penduduk, (3) Ada tidaknya dampak bencana, (4) Tingkat perubahan penggunaan lahan, dan (5) Kondisi otonomi daerah.
2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan infrastruktur di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta dengan kecenderungan infrastruktur desa-kota yakni di Kecamatan Mergangsan adalah: (1) Kondisi anggaran belanja pemerintah, (2) Tingkat pertumbuhan penduduk, (3) Ada tidaknya dampak bencana, (4) Tingkat perubahan penggunaan lahan, (5) Kondisi otonomi daerah, (6) Ada tidaknya konflik penduduk, dan (7) tingkat pelayanan infrastruktur.
3. Infrastruktur yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta seluruhnya, baik di wilayah pinggiran dengan kecenderungan infrastruktur desa maupun di wilayah pinggiran dengan kecenderungan infrastruktur desa-kota adalah air bersih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis W.A.P. mengucapkan terima kasih kepada Putu Gde Ariastita, ST., MT., yang telah membimbing peneliti hingga mampu menyelesaikan penelitian ini hingga akhir dan juga kepada pihak-pihak terkait yang menjadi sumber dan/atau responden yang membantu menyukseskan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. S. Yunus, 2009. *Dinamika Wilayah Peri Urban: Determinan Kota Masa Depan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- [2] *Kecamatan Dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- [3] H. S. Yunus, 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] R. Kodoatie, 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] R. Kodoatie, 2003. *Manajemendan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.